



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YASEP SETIAKARNAWIJAYA  
2. Jabatan : DIREKTUR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
3. NHK : 807936

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>410.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>265.000.000</b>
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
2. MOBIL, VOLVO S60 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA XRIDE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. MOTOR, VESPA S 125 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>469.000.000</b>
<b>D. SURAT BERTAHAPAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>50.000.000</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>99.211.116</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.293.211.116</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>557.000.000</b>



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

736.211.116

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.